

## Kontestasi *Buzzer* Politik dalam Mengawal APBD DKI Jakarta

Bambang Arianto

Peneliti LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

Email : ariantobambang@unu-jogja.ac.id

### Abstrak

Artikel ini akan mengelaborasi peran *buzzer* politik dalam mengawal penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Para *buzzer* politik berjejaring dan membangun partisipasi digital untuk mengawal berbagai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui tagar (hashtag) *e-BudgetingCegahKorupsi* para *buzzer* politik telah dapat memperkuat opini publik, bahwa adanya indikasi kecurangan (*fraud*) dalam penyusunan APBD DKI Jakarta. Para *buzzer* politik berupaya menjadikan media sosial sebagai saluran untuk mengawal berbagai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu tampak dari tagar (hashtag) yang dibangun dengan pemilihan kata kunci yang mengedepankan semangat anti korupsi secara partisipatif. Artikel ini berpendapat bahwa *buzzer* politik telah memperkuat polemik penyusunan APBD DKI Jakarta menjadi opini publik. Artikel ini juga berpendapat bahwa *buzzer* politik telah berperan positif dalam mengawal penyusunan APBD termasuk berbagai kebijakan Provinsi DKI Jakarta.

**Kata Kunci:** *Buzzer* Politik, *E-Budgeting*, APBD DKI Jakarta

### PENDAHULUAN

Polemik perihal penerapan penganggaran *online* atau dikenal dengan *e-budgeting* telah banyak dibahas sejak pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Polemik tersebut berawal dari munculnya indikasi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak sesuai prioritas yang disusun oleh pemerintah DKI Jakarta. Eksesnya kala itu Ahok berani mencoret dana yang tidak rasional tersebut. Akan tetapi, bagi publik langkah taktis Ahok dengan mencoret anggaran yang tidak rasional, merupakan tindakan tepat sekaligus bentuk konsistensi dari semangat anti-korupsi. Apalagi, dana tersebut yang disusupkan ke APBD Pemerintah daerah DKI Jakarta tahun 2015 cukup besar, mencapai Rp 12 triliun. Artinya, dana publik yang digunakan tentu besar, sehingga penggunaannya juga harus berbasis kepentingan rakyat.

Ternyata, polemik yang sama terjadi kembali pada periode pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pemerintahan Gubernur Anies Baswedan banyak sekali ditemui kebijakan yang disusun oleh pemerintah DKI Jakarta jauh dari keinginan publik. Tidak salah bila kemudian penyusunan anggaran ini telah memicu aksi protes dari warga Jakarta terutama melalui

media sosial. Merujuk pemberitaan di berbagai media massa, sejak kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan banyak ditemui kebijakan provinsi DKI Jakarta yang menuai kontroversial dan mendapat penolakan publik serta warganet. Mulai dari pembangunan patung bambu dengan biaya 500 juta hingga polemik “Lem Aibon” untuk sekolah di DKI Jakarta yang dianggarkan hingga mencapai Rp 82 Miliar meski temuan *Indonesia Corruption Watch* mencapai 126 Miliar (*Tempo.co*, 2019).

Kebijakan penganggaran “Lem Aibon” dengan mata anggaran yang fantastis dan juga tertera dalam sistem penganggaran *online* (*e-budgeting*) pemerintah provinsi DKI Jakarta membuat publik DKI Jakarta bertanya-tanya dengan anggaran tersebut. Polemik ini menjadi isu bersama yang kemudian melahirkan berbagai penolakan hingga protes dari warganet. Apalagi, kemudian muncul usulan bahwa Gubernur Anies Baswedan berencana menghapus sistem *e-budgeting* (penganggaran online) dalam pemerintahan DKI Jakarta. Usulan ini tentu ditolak oleh banyak pihak terutama dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana yang tegas menolak kebijakan tersebut. Penolakan dari politisi ini kemudian juga memunculkan banyak dukungan dari para warganet,

Penolakan dikarenakan bagi warganet sudah saatnya anggaran publik yang digunakan oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaannya harus memperhatikan prinsip transparansi, seperti menyangkut legalitas sumber anggaran, mekanisme penggunaan, alokasi, dan pertanggungjawaban agar bisa diketahui secara luas oleh publik. Dikarenakan penilaian bahwa anggaran atau APBD merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia, sejatinya sudah mulai dikesampingkan oleh para pejabat pemerintah daerah dan juga anggota legislatif. Sebab, penilaian ini membuat para pejabat daerah enggan untuk mengedepankan prinsip transparansi soal anggaran.

Bahkan dari penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW), ketiadaan aspek transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut dapat menimbulkan beberapa modus kejahatan korupsi-suap di APBD yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Modus itu meliputi; (1) modus penipuan terhadap anggaran yang dipraktekkan dengan cara mengambil pos anggaran yang bukan peruntukannya; (2) modus menciptakan anggaran baru, yakni dengan menciptakan anggaran baru yang tidak di atur dalam PP No.110/2000; (3) modus *mark up* anggaran dengan cara melebihkan anggaran berbagai tunjangan anggota legislatif maupun eksekutif; (4) modus pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya. Seperti, biaya

pemeliharaan kesehatan yang dirinci lagi menjadi tunjangan kesehatan, biaya *general check up*, dan biaya perawatan pengobatan; (5) modus pembuatan anggaran tanpa perincian yang dilakukan dengan cara membentuk satuan atau mata anggaran tanpa rincian lagi; (6) modus menghilangkan pos anggaran dengan cara menghapus pos anggaran sebagaimana ditetapkan dalam PP No.110/2000; (7) modus pengalihan anggaran dengan cara mengalihkan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk pemberian uang langsung (Arianto,2003).

Polemik ini kemudian membuat isu *e-budgeting* meledak dan banyak mendapatkan respon dari publik. *Buzzer* merupakan salah satu aktor warganet yang aktif bersuara menolak penyusunan APBD DKI Jakarta tersebut. Dimana warganet terdiri dari *follower*, *buzzer* dan *influencer*. Sejatinya, istilah *buzzer* merupakan sosok akun media sosial baik anonim atau nyata (*real*) yang setiap saat menyebarluaskan, mengkampanyekan dan mendengungkan, suatu pesan atau konten kepada warganet dengan tujuan memperkuat pesan atau konten tersebut menjadi opini publik. Dengan kata lain, *buzzer* media sosial lebih identik dengan aktor yang berupaya memperkuat sebuah pesan dan konten agar bisa menarik perhatian serta atensi warganet.

Para *buzzer* politik ini berasal dari para relawan politik pendukung Ahok pada pemilihan kepala daerah 2017 yang bisa dilacak dari identitas yang digunakan disetiap akun media sosialnya masing-masing. Para *buzzer* politik ini berusaha memperkuat argumentasi politisi Partai Solidaritas Indonesia yang dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Penolakan yang digalang oleh *buzzer* politik melalui media sosial *twitter* cukup memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat kuasa warganet untuk menolak kebijakan yang jelas akan memperlebar indikasi praktik kecurangan (*fraud*) yakni korupsi suap. Hal itu bisa dilacak dari munculnya banyak tagar yang menolak berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi publik. Sedangkan salah satu tagar (*hashtag*) yang cukup dikenal yaitu *e\_BudgetingCegahKorupsi*.

Dengan pemahaman demikian para *buzzer* politik berupaya membangun opini publik untuk melakukan penolakan terhadap penyusunan APBD yang dikhawatirkan akan menimbulkan adanya indikasi praktik korupsi suap. Melalui tagar *twitter* para *buzzer* politik berusaha membangun partisipasi digital warganet untuk bisa ikut menyampaikan aspirasinya melalui postingan dan komentar mengenai APBD DKI Jakarta. Para *buzzer* politik memilih *twitter* dalam mengangkat kasus ini dikarenakan *twitter* sangat cepat untuk memviralkan sebuah opini publik. Dikarenakan dampak resonansi yang dibangun oleh *twitter*, bisa cepat menyebar ke semua media sosial lainnya

seperti di *Instagram*, *Facebook* dan *Whatsapp*. Dalam mengawal penyusunan APBD dan berbagai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta, para *buzzer* politik ini mendorong tagar *e-BudgetingCegahKorupsi* sebagai bentuk partisipasi digital warganet, sekaligus bentuk sikap oposisi terhadap pemerintahan DKI Jakarta. Selain itu pula para *buzzer* politik menggunakan banyak tagar politik dengan kata kunci lainnya agar bisa mendorong kesadaran warganet akan bahaya adanya indikasi celah korupsi suap dalam berbagai kebijakan pemerintahan DKI Jakarta.

Partisipasi digital inilah yang bisa dihubungkan dengan komitmen sebagian pihak untuk membangun kultur oposisi dalam langgam demokrasi digital melalui tagar Twitter. Partisipasi digital dapat didefinisikan sebagai transformasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang dimediasi oleh internet dan teknologi informasi (Saeb, et al., (2008). Tujuannya adalah agar membangun kewarganegaraan yang aktif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan kata lain, internet telah memfasilitasi munculnya sistem komunikasi baru yang memungkinkan setiap individu membangun jaringan komunikasi mereka sendiri (Castells, 2012a).

Partisipasi digital yang dibangun dari tagar twitter yang kemudian dapat menjadi trending topik dapat dikatakan sebagai bentuk protes era milenial. Apalagi dalam konteks kepemimpinan Anies Baswedan ada kecenderungan menurunnya semangat menjadi oposisi dari partai politik pendukung. Hal itu tampak dari minimnya politisi yang mengkritisi berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta. Melihat kenyataan ini, tentu diperlukan kekuatan alternatif, yakni oposisi ekstra-parlementer yang berasal dari simpul warganet. Artinya untuk pelembagaan demokrasi mutlak diperlukan kekuatan alternatif sebagai pengontrol kekuasaan.

Dalam konteks demokrasi digital simpul itu berasal dari para warganet baik itu *follower*, *buzzer* dan *influencer*. Sebab *buzzer* politik yang berasal dari para relawan tentu memiliki ideologi yang kuat dalam membangun kultur oposisi yang dinamis. Bahkan dalam konteks DKI Jakarta, peran *buzzer* politik cukup konsisten membangun isu oposisi melalui berbagai tagar politik. Apalagi langgam politik Indonesia semakin dinamis semenjak kehadiran para relawan politik yang muncul sejak era pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2012, kontestasi politik 2014, 2017 dan 2019 yang menunjukkan meningkatnya semangat sukarelawan (Arianto 2014).

Dalam konteks ini tidak semua partai politik memiliki semangat oposisi dan berani mengkritisi setiap kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Hal itu disebabkan akses ekonomi dalam pusat kekuasaan lebih menguntungkan ketimbang harus menjadi oposisi. Banyak partai

politik yang seolah-olah merasa tidak akan mampu berbuat banyak bila memilih menjadi oposisi. Hal ini diperparah lagi dengan merebaknya gejala pragmatisme yang seringkali melanda partai politik di Indonesia, dimana kekuasaan menjadi segala-galanya dalam berpolitik. Dengan demikian, wacana akan hadirnya oposisi yang konstruktif sangat sulit diwujudkan.

Padahal, politik yang dinamis memerlukan keseimbangan kekuasaan. Sebab, kekuasaan tanpa penyeimbang akan mudah terjatuh pada bentuk otoritarianisme dan kesewenangan lainnya. Kekuatan penyeimbang tidak dapat disangkal lagi merupakan prasyarat utama bagi tegaknya tatanan demokrasi. Dengan kata lain, oposisi harus dapat menjadi pilihan terbaik bagi sejumlah partai politik melakukan pelembagaan politik. Jika peran oposisi yang dimainkan berjalan secara benar dan konstruktif, besar kemungkinan oposisi bisa menjadi investasi politik pada masa-masa yang akan datang. Selain itu, pilihan oposisi dapat menarik simpati publik sehingga kemudian dapat menciptakan peralihan kekuasaan yang silih berganti di Indonesia sebagai prasyarat konsolidasi demokrasi.

Dengan demikian pilihan oposisi dipercaya bisa menciptakan pemerintahan yang efektif yang mampu menciptakan garis demarkasi yang jelas antara kubu pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini akan membangun mekanisme pengawasan dan fungsi penyeimbang (*check and balances*) yang dinamis. Oposisi dibutuhkan bukan hanya untuk mengawal kekuasaan, tetapi diperlukan karena apa yang baik dan benar dalam politik harus pula diperjuangkan melalui kontes politik serta diuji dalam wacana politik yang terbuka dan bisa diakses publik. Akan tetapi dalam konteks pemerintahan DKI Jakarta justru peran warganet lebih aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah.

Dalam peran ini oposisi dari para warganet yang dibangun oleh para *buzzer* politik berkewajiban mengemukakan titik-titik kelemahan dari suatu kebijakan yang dapat merugikan rakyat bisa dideteksi sedini mungkin. Dalam konteks ini peran oposisi bukan sebatas memperingatkan pemerintah terhadap kemungkinan salah kebijakan atau salah tindakan. Tetapi lebih dari itu yakni ikut menunjukkan apa yang tidak harus dilakukan, tetapi justru dilakukan oleh pusat kekuasaan. Jika kemudian kekuasaan bisa muncul dari proses demokrasi yang substantif, pilihan oposisi bagi warganet bisa menjadi pilihan untuk bisa ikut serta membangun kultur Indonesia yang demokratis.

Lebih lanjut, dalam konteks ini oposisi yang dimaksudkan, bukanlah sekadar sikap asal berbeda atau melawan kebijakan pemerintah, melainkan kelompok di luar pemerintah yang mampu melakukan kontrol dengan tegas dan memberikan alternatif kebijakan yang argumentatif. Meski demikian, pada kenyataannya eksistensi oposisi di Indonesia masih belum cukup solid. Akan tetapi, upaya-upaya yang dapat menguatkan peran oposisi baik dalam makna kesadaran dan tradisi ataupun struktural (lembaga-lembaga demokrasi dan aturan main) harus dilakukan agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat semakin membaik (Noor, 2016).

Pendek kata, dengan semakin berperannya media sosial sebagai saluran membangun partisipasi digital membuat *buzzer* politik semakin memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang kemudian mengajak pada pertanyaan; Bagaimana peran para *buzzer* politik dalam mengawal penyusunan APBD dan berbagai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta? Batasan dalam penelitian ini hanya seputar peran dan implikasi para *buzzer* politik dalam upaya mengawal penyusunan APBD dan berbagai kebijakan provinsi DKI Jakarta.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yakni kuantitatif dan kualitatif dengan objek penelitian pada *buzzer* politik pengguna media sosial *Twitter*. Adapun untuk pengumpulan data melalui data kuantitatif diambil dari percakapan *twitter* melalui data *Social Network Analisis* (SNA) yang berasal dari *Drone Emprit Academic* Universitas Islam Indonesia (Dea.uii.ac.id) yang kemudian didukung oleh data-data melalui pendekatan kualitatif. Data ini diambil dari percakapan warganet yang menggunakan tagar (*hashtag*) *e-BudgetingCegahKorupsi* dari tanggal 5 hingga 13 November 2019. Sedangkan data kualitatif menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap beberapa warganet pengguna aktif *Twitter*. Waktu yang digunakan selama satu bulan sejak 20 November hingga 2 Desember 2019. Data primer diperoleh dari berbagai unsur warganet yang aktif di *Twitter* baik yang termasuk klasifikasi *follower*, *buzzer* maupun *influencer*.

Para informan ini dipilih karena berdasarkan keaktifan memposting di *Twitter* terutama konten-konten yang membahas penyusunan APBD DKI Jakarta. Adapun para informan tersebut diantaranya; @WagimanDeep @nety\_rusy @Anak\_Kolong @arifbsantoso @BamsBulaksumur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara digital melalui media

sosial *Whatsapp* dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Teknik ini dipilih dikarenakan banyak responden yang tidak mau bertatap muka dan ingin identitasnya tetap terjaga dengan aman. Dengan demikian diharapkan penelitian ini bisa mengelaborasi secara komprehensif peran *buzzer* politik dalam mengawal penyusunan APBD dan berbagai kebijakan pemerintahan DKI Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Buzzer* Politik

Di era revolusi industri 4.0 peranan media sosial semakin memberikan arti penting bagi kehidupan berdemokrasi. Dengan jejaring yang dibangun media sosial bisa menjadi salah satu saluran partisipasi kewargaan. Apalagi di era *post-truth* media sosial bisa mendorong tumbuhnya partisipasi digital sekaligus juga melahirkan banalitas politik digital. Hal itu disebabkan era *post-truth* informasi yang beredar akan lebih dipenuhi oleh disinformasi hingga hoaks. Perkembangan media sosial, juga turut diikuti oleh kehadiran para aktor warganet yang selama ini dikenal dengan *buzzer* dan *influencer*. Kedua aktor dari warganet ini menjadi aktor pembaharu sekaligus kelompok penekan. Dikatakan demikian, karena sebagai aktor pembaharu media sosial dapat memberikan banyak kontribusi nyata dalam membangun partisipasi publik secara digital. Akan tetapi sebaliknya, para aktor tersebut juga bisa menjadi kelompok penekan melalui postingan dan komentar yang bisa menjadi viral.

Perlu diketahui seiring berkembangnya media sosial, *buzzer* tidak hanya bergerak di *Twitter* saja, akan tetapi sudah merambah ke semua media sosial seperti; *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp* hingga *Youtube* dengan tujuan memperkuat sebuah konten. Dengan demikian, bisa ditarik simpulan bahwa *buzzer* adalah orang yang menyebarluaskan, mengkampanyekan, mendengungkan, suatu pesan maupun konten. Sehingga *buzzer* media sosial bisa dikatakan sebagai tim pemasaran digital yang tujuannya memperkuat pesan atau konten tersebut di media sosial agar bisa menarik atensi publik seluas mungkin. Apalagi di era *post-truth* (penyangkalan kebenaran) peran *buzzer* media sosial sangat menentukan dalam mempengaruhi pembentukan suatu opini publik hingga mempengaruhi dinamika demokrasi digital.

Seiring perkembangan media sosial, *buzzer* terbagi menjadi *buzzer* bisnis dan *buzzer* politik. Dalam warganet, sistem kerja *buzzer* dalam menyebarluaskan, mengkampanyekan,

mendengarkan suatu pesan atau konten memiliki tiga kategori yakni, (1) membangun citra positif (*supporting*), (2) mengklarifikasi citra (*defensif*) (3) menyerang dan merusak citra pesaing (*offensive*). Akan tetapi terdapat perbedaan antara *buzzer* bisnis dan *buzzer* politik. Dalam konteks bisnis digital *buzzer* bisnis lebih banyak bergerak di ranah *supporting* dan *defensif*. Sedangkan dalam konteks politik, *buzzer* lebih banyak bergerak dalam kategori *offensive* dengan memanfaatkan berbagai pesan maupun konten baik itu fakta hingga tidak jarang menggunakan hoaks. Dengan begitu *buzzer* dikenal memiliki kemampuan amplifikasi pesan yang cepat untuk membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. Hal itu dikarenakan karakteristik kerja *buzzer* media sosial menyerupai “lonceng” atau “bel” yang seringkali membuat suara bising. Dengan begitu, inilah yang membuat pesan yang disampaikan bisa cepat *viral* atau tersebar luas kepada warganet.

Tabel 1 Tipologi *Buzzer* Media Sosial

	<i>Buzzer</i> Bisnis	<i>Buzzer</i> Politik
<b>Definisi</b>	Sosok akun media sosial baik anonim atau nyata ( <i>real</i> ) yang setiap saat <u>menyebarkan, mengkampanyekan, dan mendengarkan suatu pesan atau konten bisnis</u> kepada warganet dengan tujuan memperkuat pesan atau konten bisnis tersebut menjadi opini publik.	Sosok akun media sosial baik anonim atau nyata ( <i>real</i> ) yang setiap saat <u>menyebarkan, mengkampanyekan, dan mendengarkan suatu pesan atau konten politik</u> kepada warganet dengan tujuan memperkuat pesan atau konten politik tersebut menjadi opini publik.
<b>Follower</b>	>2000 Follower	> 500 Follower
<b>Sistem Kerja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun citra positif (<i>supporting</i>)</li> <li>• Mengklarifikasi citra (<i>defensif</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun citra positif (<i>supporting</i>),</li> <li>• Mengklarifikasi citra (<i>defensif</i>)</li> <li>• Menyerang dan merusak citra pesaing (<i>offensive</i>)</li> </ul>
<b>Konten</b>	Meme, Video, Teks	Meme, Video, Teks
<b>Media Sosial</b>	Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp dan Youtube	Twitter, Facebook, Instagram dan Whatsapp
<b>Indikator Keberhasilan</b>	Memuncaki trending topik Twitter dan viral di media sosial Facebook, Instagram dan Whatsapp	

Sumber : Diolah oleh peneliti dari data *Drone Emprit Academic* 2019

Pada awalnya *buzzer* media sosial hanya dikenal *buzzer* bisnis, akan tetapi seiring manfaat yang dihasilkan oleh *buzzer* bisnis membuat teknik *buzzer* juga digunakan dalam konteks politik digital. Dalam konteks *buzzer* bisnis, hanya di kenal kategori independen yang memiliki karakter yang bebas dan tidak terikat oleh produk atau *brand* apapun. Artinya, bisa digunakan untuk kepentingan semua promosi bisnis sesuai pesanan dari agensi atau perusahaan dan tidak terbatas pada produk tertentu. Dengan sifat yang netral membuat sifat *buzzer* bisnis berwatak pragmatis. Artinya, para *buzzer* bisnis bergerak sesuai dengan tuntutan para pembayar dan penyewa. Para

*buzzer* bisnis seringkali mematok tarif sesuai dengan banyaknya *follower* yang dimiliki dan tingkat kesulitan yang dihadapi.

Berbeda dengan *buzzer* politik yang terbagi menjadi dua kategori yakni independen dan relawan. *Pertama*, *buzzer* independen memiliki karakter yang bebas dan tidak terikat oleh kelompok atau organisasi apapun. Artinya bisa digunakan untuk kepentingan *branding* atau kampanye semua konten yang berkaitan dengan politik sesuai pesanan dari agensi, politisi, partai politik ataupun *stakeholder* yang menggunakan jasanya. Dengan sifat yang netral dan bebas kepentingan membuat *buzzer* jenis ini sangat rentan berwatak transaksional. Dengan kata lain, para *buzzer* jenis ini bergerak sesuai dengan tuntutan para pembayar dan penyewa. Para *buzzer* ini seringkali mematok tarif sesuai dengan banyaknya *follower* yang dimiliki dan tingkat kesulitan yang dihadapi.

*Kedua*, *buzzer* relawan memiliki sifat partisan karena memiliki keterkaitan dengan figur politik, partai politik atau persamaan gagasan sosial politik lainnya. *Buzzer* sejenis ini banyak berasal dari warganet yang selama ini sangat aktif di media sosial. Dikarenakan lebih mengedepankan sikap partisan dan sukarelawan maka seringkali *buzzer* ini disebut sebagai relawan politik digital. Para *buzzer* politik tidak menerima bayaran karena melakukan aktivitas *buzzer* berdasarkan dukungan secara sukarela atau dikenal sebagai relawan politik digital yang selalu mengedepankan semangat *voluntarisme* (Arianto, 2019).

### **Warganet dan APBD DKI Jakarta**

Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86 persen. Sedangkan kontribusi terbesar atas penetrasi internet di Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Angka penetrasi di pulau ini mencapai 55 persen dari total keseluruhan. Sementara Pulau Sumatera berada di posisi kedua dengan menyumbang penetrasi sebesar 21 persen. Sedangkan penduduk di wilayah rural masih menghadapi kendala dalam terhubung dengan dunia maya atau ada sekitar 38,4 persen penduduk yang bukan merupakan pengguna internet (Kompas.com, 2019).

Identifikasi tersebut semakin membuktikan bahwa penggunaan internet dan media sosial telah semakin banyak dan bahkan menjadi kebutuhan primer saat ini oleh masyarakat Indonesia. Jadi tidak salah bila ada informasi maupun opini ketidakadilan akan dengan cepat direspon oleh warganet. Hal itu bisa dilacak dalam polemik penyusunan APBD DKI Jakarta yang hanya berawal dari cuitan seorang anggota DPRD DKI Jakarta, telah membuat politik digital gaduh. Dimana politisi William Aditya Sarana yang mempertanyakan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian Lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar melalui akun media sosial Twitternya @willsarana (29/10/2019). Politisi PSI ini mempertanyakan “mengapa saat ini, era Gubernur DKI Anies Baswedan, link APBD ditutup. Padahal, saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), masyarakat DKI Jakarta bisa mengakses link APBD tersebut”

Sontak cuitan tersebut direspon oleh warganet yang kemudian bersama-sama melakukan kritik dan konfirmasi terhadap anggaran yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta. Berikut laman *E-Budgeting* yang menjadi awal polemik warganet.



The screenshot shows the 'RINCIAN KEGIATAN' (Activity Details) page on the APBD Jakarta website. It displays the following information:

- Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
- Organisasi : 10101301 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR
- Program : 1.01.02 Program Wajib Belajar 12 Tahun
- Kegiatan : 1.01.02.001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri
- Pagu Kegiatan : Rp. 82,800,000,000

Below this, there is a table with columns: Komponen, Satuan, Koefisien, Harga, PPN, and Total. The table shows a single entry for 'Lem Aibon' with a total value of 82,800,000,000.

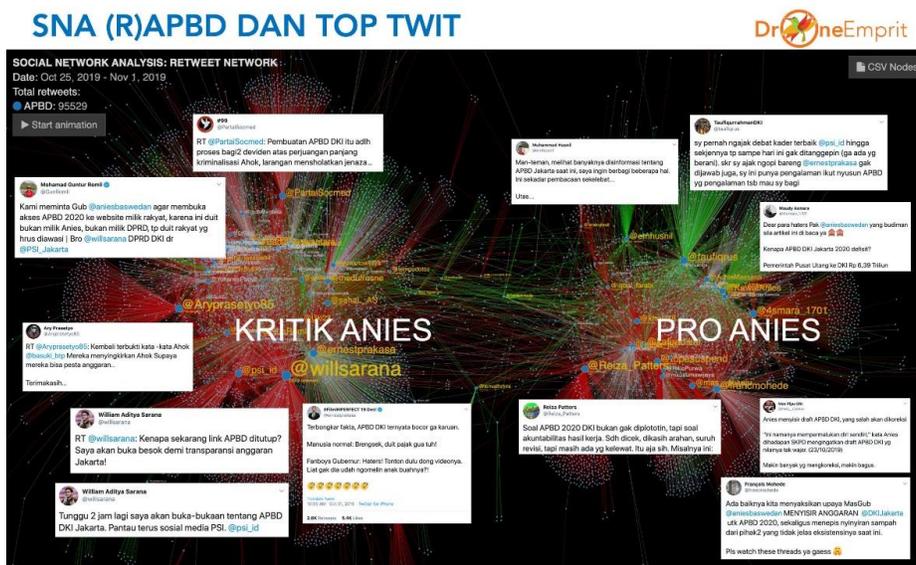
Komponen	Satuan	Koefisien	Harga	PPN	Total
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor					
Lem Aibon	kg	37500 Crang x 12 Bulan	184,000	0	82,800,000,000

At the bottom of the screenshot, it shows '59 11:38 PM - Oct 29, 2019'.

Gambar 1 Situs *e-budgeting* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Cuitan politisi PSI tersebut yang kemudian direspon oleh warganet membuktikan bahwa media sosial memiliki kuasa dalam masyarakat jejaring. Dengan kata lain, kekuatan yang terdapat dalam masyarakat jaringan di media sosial ini seringkali melahirkan partisipasi publik. Hal itu mengkonfirmasi studi Bowman & Willis (2003) yang mengatakan bahwa media sosial berbasis internet sering disebut sebagai medium partisipatoris. Selain informatif dan interaktif, medium ini seringkali memiliki watak partisipatoris karena dirancang untuk memungkinkan setiap individu menjadi pribadi yang terlibat membentuk masyarakat yang hidup didalamnya. Dengan kata lain,

media sosial berbasis internet bisa digunakan sebagai medium untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi warga negara dalam proses politik dan terlibat dalam urusan pemerintahan. Dalam polemik APBD DKI Jakarta para warganet sangat partisipatif melakukan kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi kontestasi antar warganet di media sosial *twitter*.



Gambar 2 Kontestasi para *buzzer* politik di Twitter

Dalam percakapan ini tampak beberapa akun *buzzer* politik telah berganti posisi menjadi *influencer* politik dalam memberikan komentarnya seputar perumusan APBD DKI Jakarta. Seperti yang diutarakan oleh pemilik akun @PartaiSocmed yang menyebutkan bahwa “Pembuatan APBD DKI itu adalah proses bagi-bagi deviden atas perjuangan panjang kriminalisasi Ahok, larangan mensholatkan jenazah”. Sedangkan akun-akun yang mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan juga memberikan argumentasi yang berbeda seperti dari akun @Mass\_Piyuu yang menyatakan bahwa “Ini namanya mempermalukan diri sendiri, kata Anies di hadapan SKPD mengingatkan draf APBD DKI yang dinilai tidak wajar (23/10/2019). Makin banyak yang mengoreksi makin bagus”

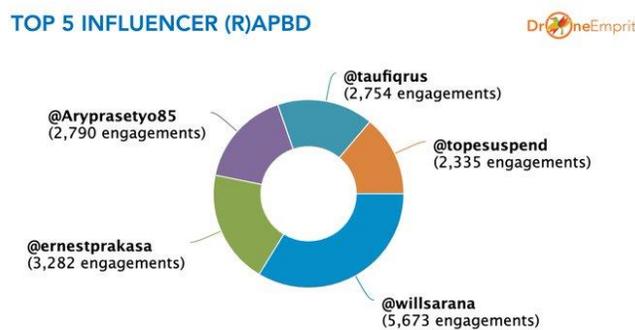
Dalam membangun opini, para *buzzer* politik yang mengkritisi penyusunan APBD DKI Jakarta, menggunakan konten yang salah satunya berasal dari media online. Dalam konteks ini ada beberapa media *online* yang sering digunakan oleh para *buzzer* politik dalam membangun isu.

Selain itu ada beberapa bentuk konten gambar (*image*) yang paling banyak mendapat respon para warganet.



Gambar 3 Daftar *Image* yang paling di sukai warganet di *twitter*

Tentulah dalam membangun isu perihal APBD DKI Jakarta akan ditemui para tokoh-tokoh berpengaruh yang dalam konteks ini disebut *influencer*. Dari catatan Drone Emprit Academic (2019) ada beberapa akun yang bisa disebut *influencer* politik, meskipun terkadang bergantian menjadi *buzzer* politik ketika para *influencer* itu ikut melakukan *retweet* atau *repost* dengan tujuan memperkuat opini yang sedang berkembang tersebut. Akun-akun tersebut yakni @Ernestprakasa dengan 3,282 engagements, @Aryprasetyo85 dengan 2,790 engagements, @taufiqrus dengan 2,754 engagements, @topesuspend dengan 2,335 engagements dan @willisrana dengan 5,673 engagements.



Gambar 4 Para top *influencer* politik

Data tersebut mengonfirmasi bahwa para *buzzer* politik yang berganti posisi menjadi *influencer* politik bisa mendorong partisipasi digital para warganet untuk ikut membahas opini ini untuk menjadi isu yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran politik kewargaan. Dalam penelitian

ini ada beberapa akun *buzzer* politik yang berasal dari akun nyata (*real*) dan anonim yang menjadi objek penelitian. Berikut profil akun-akun *buzzer* politik di twitter yang dianalisis oleh peneliti ;

Tabel 2 Profil Akun Twitter Informan

No	Akun Twitter	Followers	Jenis Akun
1	@WagimanDeep	39.065	Akun Anonim
2	@nety_rusi	4.284	Akun Real
3	@arifbsantoso	1.521	Akun Anonim
4	@AnakKolong	9.970	Akun Anonim
5	@BamsBulaksumur	21.051	Akun Real

Para *buzzer* politik memiliki alasan utama dalam memposting konten bertema APBD DKI Jakarta dan *e-budgeting* dalam akun Twitternya masing-masing. Akan tetapi tujuan utama para *buzzer* politik ini adalah ingin memperkuat opini APBD ini agar semakin dikenal luas oleh warganet. Bahkan salah satu *buzzer* politik @WagimaneDeep mengatakan bahwa “sebagai warga DKI dan wajib pajak, saya berhak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mana salah satunya menyangkut pengelolaan dan penggunaan APBD. Jika ada berita tentang kegagalan penggunaan APBD, tentu saya merasa wajib dan berhak memposting hal tersebut untuk kemudian bisa di ketahui banyak pihak. Dari sharing informasi, saya berharap banyak pihak yang angkat bicara, mengklarifikasi berita, bahkan membantu untuk meneruskan berita tersebut ke pihak yang berkompeten”. Sedangkan akun @nety\_rusi mengatakan bahwa “agar ada transparansi dalam proses *e-budgeting* DKI Jakarta, mengingat transparansi ini secara keseluruhan agak berubah semenjak pergantian pemimpin di ibukota. Oleh karena itu kami berkepentingan mengawasi, karena tidak rela APBD DKI Jakarta dijadikan bancakan”.

Para *buzzer* politik ini selalu menggunakan tagar (*hashtag*) sebagai salah satu strategi untuk menarik perhatian warganet dalam setiap cuitan di *twitter*. Penggunaan tagar tersebut membuktikan bahwa tagar dalam media sosial semakin memiliki kuasa yang lebih dan tidak sekedar digunakan untuk pengelompokan informasi atau penanda kata kunci yang paling banyak dibicarakan warganet. Hal itu pula yang mendasari para *buzzer* politik bahwa polemik yang terjadi di pemerintahan provinsi DKI Jakarta terutama dalam rancangan penyusunan APBD benar adanya. Dari pengakuan beberapa *buzzer* politik, informasi ini didapatkan dari membaca dan mempelajari berbagai sumber terkait. Seperti dijelaskan oleh akun @WagimanDeep “setelah membaca dan mempelajari banyak sumber berita dan kesaksian orang-orang yang terkait, saya yakin bahwa polemik “lem aibon” sarat dengan kecurangan”. Sedangkan dari akun @nety\_rusi mengatakan

bahwa “secara logika, untuk apa anak sekolah konsumsi “lem aibon” dalam jumlah besar? Prakarya anak sekolah tidak sebanyak itu menggunakan “lem aibon”. Apakah setiap proses kegiatan belajar mengajar yang kreatif menggunakan “lem aibon”. Inilah yang kemudian mengundang banyak kecurigaan banyak warganet”.

Para *buzzer* politik ini bergerak melakukan kritikan terhadap rancangan APBD DKI Jakarta karena banyaknya kegagalan yang ditampilkan dalam laman *e-budgeting* Provinsi DKI Jakarta. Bahkan para *buzzer* politik ini menilai bahwa bila teridentifikasi satu masalah yang terasa janggal maka bisa dipastikan penyusunan rancangan APBD DKI Jakarta dipastikan dipenuhi dengan kecurangan. Selain itu para *buzzer* politik juga menilai bahwa bila pembelian barang dan jasa tentu harus menggunakan nilai taksiran yang logis, akan tetapi bila terlalu berlebihan ini menjadi bukti nyata adanya indikasi kecurangan. Sebab dalam kasus-kasus kecurangan (*fraud*), pengadaan barang paling banyak ditemui kasus kecurangan. Menurut akun @BamsBulaksumur bahwa “pembelian barang dan jasa tentu harus menggunakan nilai taksiran yang logis, akan tetapi bila terlalu berlebihan ini menjadi bukti nyata adanya indikasi kecurangan. Sebab dalam kasus-kasus kecurangan (*fraud*), pengadaan barang paling banyak ditemui kasus kecurangan.”

Para *buzzer* politik akan terus menyuarakan kritikan bila terjadi ketidakadilan dan kegagalan yang akan merugikan masyarakat seperti yang diutarakan oleh akun @WagimanDeep. Sedangkan akun @nety\_rusi akan tetap berusaha menyuarakan ketidakadilan yang dapat merugikan keuangan negara terutama dalam perancangan APBD DKI Jakarta melalui media sosial. Sedangkan akun @BamsBulaksumur mengatakan bila ditemui berbagai indikasi korupsi, suap dan berbagai bentuk kecurangan lainnya, saya akan tetap selalu memposting di media sosial. Minimal bila sibuk akan membantu men-*share* atau me-*retweet* agar kasus-kasus kecurangan yang bisa merugikan negara bisa diketahui oleh publik dengan cepat. Menurut akun @WagimanDeep “bila hal yang dimaksud sudah pasti kebenarannya, maka saya tidak akan ragu untuk memberitakannya melalui media sosial. Saya percaya bahwa masyarakat lain juga berhak untuk mengetahuinya”. Selain itu akun @nety\_rusi “mensuarakan di media sosial. Saya pekerja, waktu saya terbatas untuk berkontribusi untuk negara, yang bisa saya lakukan adalah menjadi warganet yang aktif melalui media sosial. Sebab media sosial, selain daya jangkauan yang lebih besar, juga terkait keterbatasan waktu yang saya punya”.

Identifikasi tersebut semakin dari pernyataan para *buzzer* politik tersebut semakin menegaskan bahwa *buzzer* politik juga akan membantu bila menemui berbagai bentuk kecurangan. *Buzzer* politik tidak harus menjadi tim bayaran dan akan memposting informasi sesuai pesanan semata. Data ini juga akan menolak anggapan bahwa *buzzer* politik lebih identik dengan tim bayaran dengan mempergunakan konten hoaks. Dengan kata lain, data tersebut bisa ditarik simpulan bahwa *buzzer* politik juga dapat berada pada posisi penegak kebenaran dalam konteks masyarakat digital.

Selain itu para *buzzer* politik menyatakan bahwa sebagai warganet ada beberapa langkah yang akan dilakukan bila mendengar dan mengetahui telah terjadi kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara. Para *buzzer* politik ini tetap berharap banyak pada wakil partai politik yang duduk di legislatif. Meski demikian ada pula *buzzer* politik yang menyatakan tidak terlalu berharap dengan para wakil rakyat dalam mensuarakan ketidakadilan dan potensi kecurangan. Sedangkan pendapat akun @AnakKolong akan mempublikasikan di media sosial sebagai upaya mendorong publik untuk berperan aktif dalam mengawal kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sedangkan menurut @WagimanDeep bahwa “kapasitas saya hanya terbatas sebagai warga biasa yang hanya mempunyai akses ke informasi APBD DKI Jakarta lewat *website*. Saya justru menaruh harapan besar kepada wakil-wakil rakyat di DPRD untuk lebih aktif mengawasi langsung dan kemudian menginformasikan hal-hal yang menyangkut APBD kepada masyarakat luas”. Menurut akun @AnakKolong bahwa “mempublikasikan di media sosial sebagai upaya mendorong publik untuk berperan aktif dalam mengawal kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara”.

Polemik ini tentu akan melahirkan strategi kedepan para *buzzer* politik dalam mengawal rancangan APBD DKI Jakarta yakni dengan tetap prokatif dengan perkembangan data-data kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta terutama dalam *e-budgeting* (penganggaran *online*) seperti diutarakan oleh @nety\_Rusi. Sedangkan untuk program *e-budgeting* semua *buzzer* politik sangat sepatutnya mendukung semua pemerintah daerah menggunakan *e-budgeting*. Sedangkan @WagimanDeep mengatakan bahwa semakin terbuka sebuah sistem, semakin kecil kemungkinan untuk para oknum melakukan korupsi. Pendapat lain juga diutarakan oleh akun @BamsBulaksumur yang mengatakan pemanfaatan teknologi informasi akan bisa menekan potensi korupsi suap, maka dari itu peran *e-budgeting* akan sangat penting. Akan lebih baik bila

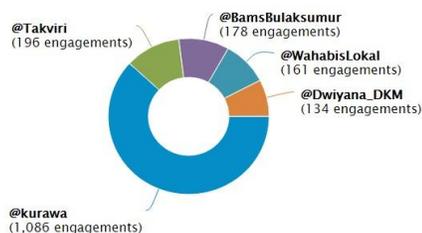
semua pemerintah daerah menggunakan *e-budgeting* sebagai bukti mengedepankan semangat transparansi.

Selain itu para *buzzer* politik ini akan tetap memberikan perhatian lebih pada perkembangan data *e-budgeting* dan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan sangat setuju dengan adanya *e-budgeting* dikarenakan bisa langsung diawasi oleh warganet. Sebab semakin terbuka sebuah sistem, maka semakin kecil kemungkinan untuk para oknum melakukan korupsi. Selain itu menurut para *buzzer* politik bahwa peran teknologi informasi akan bisa menekan potensi korupsi suap, maka dari itu peran *e-budgeting* akan sangat penting. Dengan demikian, penerapan *e-budgeting* dapat digunakan oleh seluruh pemerintah daerah sebagai bukti ikut mengedepankan semangat transparansi dihadapan publik.

### Warganet dan E-Budgeting

Dalam penelitian ini digunakan data yang berasal dari Drone Emprit Academic yang telah mengumpulkan percakapan Twitter mengenai topik *e-budgeting*. Dalam data ini ditemukan para *influencer* yang mengatur opini ini hingga memuncaki trending topik twitter. Dalam data ini ditemukan beberapa akun yang bisa disebut sebagai *influencer* yakni, @Kurawa dengan 1,086 engagement, @Takviri dengan 196 engagements, @BamsBulaksumur dengan 178 engagements, @WahabiLokal dengan 161 engagements dan @Dwiyana\_DKM dengan 134 engagements

Top Influencers



Gambar 5 Para *influencer* dengan kata kunci *e-budgeting*

Seiring berkembangnya demokrasi digital juga dikenal beberapa klasifikasi warganet diantaranya follower, buzzer dan influencer. Klasifikasi ini berdasarkan tingkat keaktifan para warganet di media sosial sehingga kemudian bisa dibagi dalam beberapa klasifikasi.

Tabel 3 Klasifikasi Warganet

	<i>Follower</i>	<i>Buzzer</i>	<i>Influencer</i>
<b>Definisi</b>	Akun media sosial yang mengikuti akun yang kita miliki.	Akun media sosial yang setiap saat menyebarluaskan mengkampanyekan dan mendengungkan suatu pesan atau konten kepada warganet dengan tujuan memperkuat pesan atau konten tersebut.	Akun media sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap para <i>follower</i> -nya sehingga bisa mendorong para <i>follower</i> -nya bisa berbuat sesuai nalar atau kehendaknya.
<b>Sifat Akun</b>	Anonim dan nyata ( <i>real</i> )	Akun anonim dan nyata ( <i>real</i> )	Mayoritas akun nyata ( <i>real</i> )
<b>Jumlah follower</b>	1-500	500 - 2000	>10.000

Diolah oleh peneliti dan data *Drone Emprit Academic* (2019)

Selanjutnya, dalam klasifikasi warganet juga memiliki peran dan fungsi masing-masing; **Follower**; sebagai penerima akhir pesan dari *buzzer* dan *influencer* serta bertugas menyebarluaskan konten dari *buzzer* dan *influencer*. **Buzzer**; (1) Membentuk dan memperkuat opini publik dalam ranah media sosial yakni dengan menempati trending topik *Twitter*. (2) Ikut membangun isu publik yang berasal dari investigasi individu maupun berasal dari *influencer* yang memiliki gagasan sama dengan isu tersebut. (3) Menyebarluaskan suatu pesan dan konten semua *platform* media sosial sehingga semakin kuat dalam nalar warganet. **Influencer**; (1) Membangun ide awal bagi pembentukan opini publik yang kemudian diteruskan oleh *buzzer* dan *follower* dengan *retweet*, *repost* atau *reshare*. (2) Membangun isu atau opini melalui proses investigasi jurnalisme warga. Tujuannya untuk membantu para *follower* dan *buzzer* memahami suatu isu atau opini yang lagi berkembang (tren). (3) Menciptakan berbagai tagar yang biasanya trending topik di *Twitter* dan banyak di sukai warganet di *Instagram*. (4) Bergerak secara individual dan lebih berpegang teguh pada prinsip atau pendapat pribadi sesuai dengan isu yang lagi trending.

Dalam konteks demokrasi digital, media sosial sangat berperan penting melahirkan para aktor utama seperti *Influencer*, *Buzzer* dan *Follower*. Ketiga aktor ini yang akan menentukan keberhasilan suatu pesan dan konten agar bisa menarik perhatian warganet. Dalam penelitian ini, ketiga aktor tersebut merupakan bagian warganet yang paling banyak memperbincangkan persoalan tata kelola pemerintahan DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan semangat anti korupsi. Hal itu bisa dilihat dari kata kunci yang banyak muncul dalam analisa *Drone Emprit Academic* 2019.

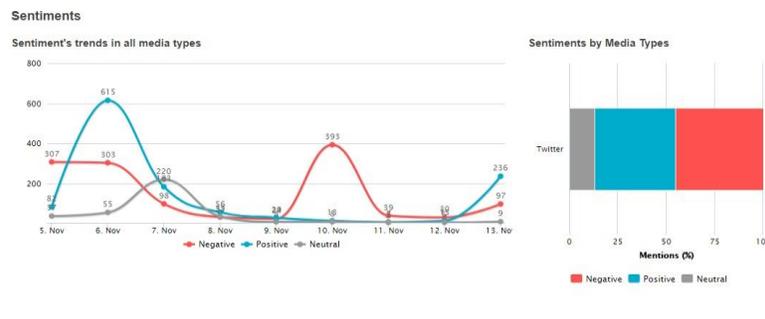


DKI Jakarta juga mendapatkan perlawanan dari *buzzer* yang mendukung kebijakan tersebut. Bahkan akun @tijabar menilai bahwa “Gegara Aibon, Terbongkar kelemahan E-Budgeting Ahok”

Avatar	User	Status	#Followers	#Retweeted	All Time	Sentiment
	@tijabar	Gegara Aibon, Terbongkar Kelemahan E-Budgeting Ahok  "Ini ad problem sistem, yaitu sistem digital tp tdk smart. Kalau smart System dia bisa melakukan pncekkan. Verifikasi dia bisa menguji. Sistemmy digital tp msh mengandalkan manual!" ~@aniesbaswedan ~  Kekampol lg diah BuzzRp Aibon <a href="https://t.co/TRVLSGm">https://t.co/TRVLSGm</a> 30/Oct/2019 21:26 WIB	54,273	2	1,452 3,245	Neutral 100 % 
	@VIVAacid	Anies Bakal Tinggalkan Sistem E-budgeting Warisan Ahok <a href="https://t.co/LULU8uyJk">https://t.co/LULU8uyJk</a> 31/Oct/2019 00:24 WIB	4,147,414	2	1,267 4,444	Negative 100 % 
	@AdhieMassardi	E-BUDGETING OLD • logikanya begini. Kalau E-Budget Ahok itu canggih, kenapa DKI bisa beli tanah milik DKI sendiri? Bisa beli bus TransJakarta rongsok yg barbuknya sudah dibakar, dan yg tanggungjawab anak buah? Kenapa juga bisa beli tanah RS Sumber Waras lebih mahal? Pohon juga. <a href="https://t.co/mOTppl0Y75">https://t.co/mOTppl0Y75</a>	52,277	1	1,204 2,700	Negative 100 % 

Gambar 8 Percakapan warganet dengan topik APBD DKI Jakarta

Dalam penelitian ini menggunakan data dari *Drone Emprit Academic* juga ditemukan berbagai komentar warganet baik itu sentimen negatif maupun positif sebagai berikut ;



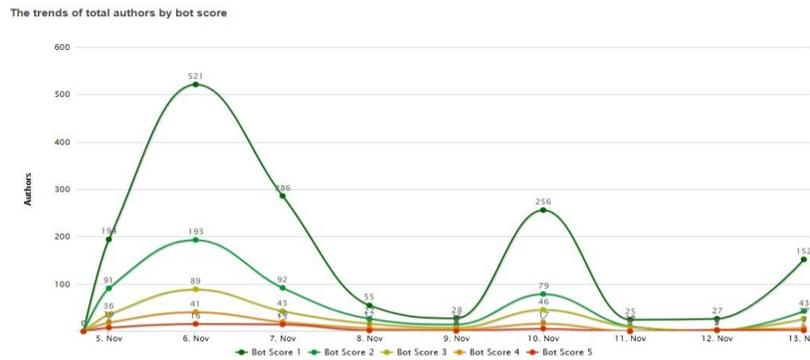
Gambar 9 Komparasi sentimen dari warganet

Menariknya para *buzzer* politik yang melakukan pengawasan dan kritik terhadap penyusunan APBD DKI Jakarta dan *e-budgeting* berasal dari seluruh Indonesia. Hal itu tampak dari data analisis SNA berikut :



Gambar 10 Wilayah warganet yang berkontribusi dengan topik *e-budgeting*

Tampak asal para warganet dan *buzzer* politik yang aktif menggunakan tagar (*hashtag*) *e\_BudgetingCegahKorupsi* berasal dari seluruh Indonesia. Ini membuktikan bahwa persoalan korupsi suap menjadi isu bersama para warganet dan *buzzer* media sosial. Menariknya data para warganet yang mengkritisi tersebut berasal dari akun-akun asli dan bukan robot (*bot*). Hal itu bisa dilacak dari minimnya akun bot alias robot dalam mengangkat tagar ini. Hanya sekitar 4 hingga 5 persen akun bot yang ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa telah terbangun partisipasi digital yang aktif dari para warganet dalam menaikkan tagar *e-BudgetingCegahKorupsi*. Bahkan dari data *Drone Emprit Academic* tampak antar *buzzer* politik saling *retweet* sehingga polemik ini semakin menguat menjadi sebuah opini publik. Dengan begitu peran *buzzer* media sosial sebagai aktor penguat telah terkonfirmasi.



Gambar 11 Data analisis akun *bot* (robot)

Dalam analisis yang ditampilkan oleh SNA *Drone Emprit Academic* tampak sekali tagar yang lebih dominan digunakan adalah *e-BudgetingCegahKorupsi* dengan 182 *tweets*. Akan tetapi juga banyak ditemui tagar (*hashtags*) lainnya yang muncul dalam polemik penyusunan APBD DKI Jakarta. Seperti #PSIKawalUangRakyat dengan 79 *tweets*, #ShutdownAnggaranSiluman dengan 47 *tweets*, #SiapKerjaSiapDiawasi dengan 47 *tweets* dan tagar #APBDuangKita dengan 46 *tweets*. Menariknya berbagai tagar muncul secara partisipatif dari aktivisme warganet yang salah satunya didorong oleh kepedulian terhadap tema politik dan pemerintahan di DKI Jakarta.



informasi dalam langgam demokrasi digital. Hal itu tampak dari *buzzer* politik yang saling *retweet* suatu pesan maupun konten seputar APBD sehingga semakin menguat menjadi opini publik.

Selain sebagai pendengung di media sosial, para *buzzer* politik ikut menyuarakan indikasi kecurangan terutama dalam rancangan APBD dan berbagai kebijakan pemerintahan provinsi DKI Jakarta. *Buzzer* politik ini memiliki kuasa dan jejaring yang kuat karena aktif di media sosial, sehingga sangat mudah mempengaruhi para *follower*-nya. Dengan terus aktif di media sosial, para *buzzer* politik dengan telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam proses mengawal hingga mengkritisi rancangan APBD DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian *buzzer* politik telah memberikan informasi, hingga pembelajaran pendidikan politik bagi warganet. Dengan menggunakan tagar (*hashtag*) *e\_BudgetingCegahKorupsi* para *buzzer* politik semakin menegaskan sebagai aktor yang bisa menyuarakan semangat anti korupsi suap sekaligus memperkuat topik APBD untuk dapat dibahas oleh warganet lebih luas. Dengan demikian, *buzzer* politik telah ikut berkontribusi melakukan pencegahan terhadap upaya tindakan kecurangan (*fraud*) terutama praktik korupsi suap. Penelitian ini juga menemukan bahwa *buzzer* politik telah memberikan kontribusi positif dalam upaya memperkuat pentingnya penerapan penganggaran *online* (*e-budgeting*) dalam tata kelola pemerintahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2014). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 18, (2), 146-162.
- . (2019). *Buzzer Media Sosial dan Branding Produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal UMKM Dewantara*. 2, (1), 27-46.
- Bowman, B. S., & Willis, C. (2003). *We Media: How audiences are shaping the future of news and information*. California: The Media Center at the American Press Institute.
- APBD.Jakarta.go.id. (2019). Diakses dari <https://apbd.jakarta.go.id/>
- Banjarmasin.tribunnews.com. (2015). Menyoal E-Budgeting. Diakses dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/09/menyoal-e-budgeting?page=all>
- Castells, M. (2012a). *Autocomunicación de masas y movimientos sociales en la era de bInternet*. In S. Aguilar (Ed.), *Anuari del Conflicte Social 2011* (pp. 11-19). Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Dea.uii.ac.id. (2019). Social Network Analysis (SNA) Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Fahmi. I. (2019). *Data Social Network Analysis Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta. 2019
- Huntington, S. (1991). *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press, Norman.

- Kompas.com. (2019). APJJI : Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 171 juta jiwa. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>
- Katadata.co.id. (2019). Heboh Anggaran Lem Aibon BK DPRD DKI Panggil Politisi PSI PEkan Depan. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/heboh-anggaran-lem-aibon-bk-dprd-dki-panggil-politisi-psi-pekan-depan>
- Noor, F. (2017). Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 1-17.
- Saeb, et al., (2008). *The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area*. *Government Information Quarterly*, 25, 400–428.
- Tempo.co.id. (2019). Bukan Rp 82 Miliar ICW Temukan Anggaran Lem Aibon Rp 126 Miliar. <https://metro.tempo.co/read/1268217/bukan-rp-82-miliar-icw-temukan-anggaran-lem-aibon-rp-126-miliar>

### **Wawancara**

Wawancara dengan pemilik akun @BamsBulaksumur pada 30 November 2019

Wawancara dengan pemilik akun @nety\_rusi pada 30 November 2019

Wawancara dengan pemilik akun @WagimanDeep pada 29 November 2019

Wawancara dengan pemilik akun @Anak\_Kolong pada 1 Desember 2019

Wawancara dengan pemilik akun @Arifsantoso pada 1 Desember 2019.